

SKRIPSI
PEMENUHAN PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2024

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

RAHMAT HABIB
2210112019

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing:

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
Fadli Rahmadhanil, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026

No.Reg : 06/PK-V/IV/2026

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No.Reg: 06/PK-V/IV/2026

**PEMENUHAN PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2024**

***FULFILLMENT OF PRINCIPLES IN THE FORMULATION OF ELECTORAL DISTRICTS
LEGISLATIVE ELECTIONS FOR THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN 2024***

Disusun Oleh:
Author:

RAHMAT HABIB
2210112019

Program Kekhususan (PK): Hukum Tata Negara (PK V)
Concentration Program (CP): Constitutional Law (CP V)

**Skripsi ini Telah Dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
5 Agustus 2026 dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji yang Terdiri Dari:**
***This Minor Thesis was Defended in the Comprehensive Examination Session on August, 5th, 2026
and Approved by a Team of Examiners Consisting of:***

Dekan
Dean



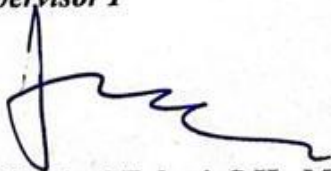
Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum.
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan I
Vice Dean I



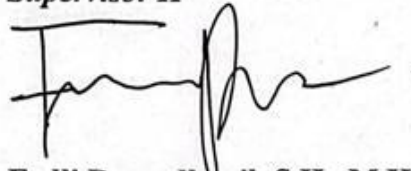
Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.
NIP. 198208092005012002

Pembimbing I
Supervisor I



Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
NIP. 198111302010121005

Pembimbing II
Supervisor II



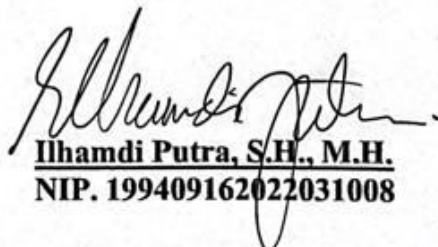
Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.
NIKU. 110199103202405101

Penguji I
Examiner I



Dr. Muhammad Irham, S.H., M.H.
NIP. 198008282015041002

Penguji II
Examiner II



Ilhamdi Putra, S.H., M.H.
NIP. 199409162022031008

	No. Alumni Universitas	RAHMAT HABIB	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar/ 13 Juni 2003 b. Nama Orang Tua : Ulil Basri dan Indri Julita c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Tata Negara e. No. BP : 2210112019	f. Tanggal Lulus : 5 Agustus 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan i. IPK : 3,79 j. Alamat : Batu Basa Tanah Datar.	

**PEMENUHAN PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2024**

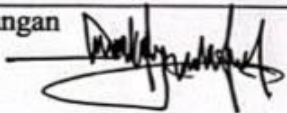
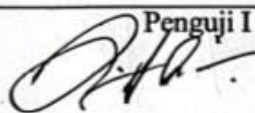
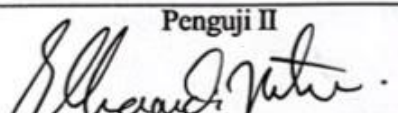
ABSTRAK

(Rahmat Habib, 2210112019, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Tata Negara, Pembimbing: Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Fadli Ramadhanil S.H., M.H., 78 halaman, 2026)

Dapil merupakan salah satu bagian dari sistem pemilu yang sangat berpengaruh terhadap hasil pemilu karena menjadi arena pertarungan bagi peserta pemilu untuk memperebutkan suara pemilih. Pada Pemilu 2024, komposisi dapil yang digunakan masih sama dengan pemilu tahun 2019 yang lalu, yaitu dapil sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran III dan IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 telah mengamanatkan untuk dikembalikannya kewenangan pendapilan kepada KPU dan meminta agar komposisi dapil dihitung dan disusun ulang. Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah; Pertama, bagaimana prinsip penyusunan dapil dipenuhi pada pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2024? Kedua, bagaimana konsep penyusunan dapil untuk masa yang akan datang untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip penyusunan dapil dipenuhi dalam susunan dapil yang dilampirkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pada PKPU Nomor 6 Tahun 2023 serta untuk mengetahui bagaimana konsep dan kaidah pembentukan dapil yang ideal demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang di perkuat dengan wawancara dan data sekunder dari BPS serta rekapitulasi hasil pemilu oleh KPU dan dielaborasi dengan pendekatan Perundang-undangan, studi kasus dan perbandingan. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024 masih ditemukan berbagai masalah terkait pendapilan, Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 telah mengembalikan kewenangan pendapilan kepada KPU, namun dalam perkembangannya KPU hanya menyalin dapil pada Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga menimbulkan banyak permasalahan pada pemilu 2024. Untuk masa yang akan datang, perlu diatur lebih rinci mengenai ketentuan penyusunan dapil dan pengalokasian kursi demi terwujudnya pemilu yang jujur adil dan berintegritas di Indonesia.

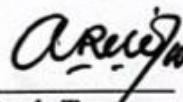
Kata Kunci: Alokasi Kursi; Daerah Pemilihan; Pemilu Legislatif DPR; Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 5 Agustus 2026
Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji I 	Penguji II 
Rahmat Habib	Dr. Muhammad Irham, S.H., M.H	Ilhamdi Putra, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara: Arfiani, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. University Alumni	Rahmat Habib	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth	: Batusangkar/13 Juni 2003	a. Graduation Date : August, 5 th 2026
	b. Parents Name	: Ulil Basri and Indri Julita	b. Pass Predicate : Cumlaude
	c. Faculty	: Law	c. GPA : 3,79
	d. Concentration	: Constitutional Law	d. Length of Study : 4 years
	e. Student ID	: 2210112187	e. Address : 0 Month
			Batu Basa, Tanah Datar.

**FULFILLMENT OF PRINCIPLES IN THE FORMULATION OF ELECTORAL DISTRICTS
LEGISLATIVE ELECTIONS FOR THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN 2024**

ABSTRACT

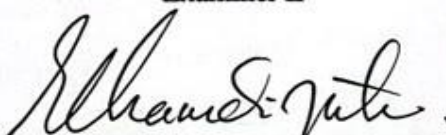
(Rahmat Habib, 2210112019, Faculty of Law, Andalas University, Constitutional Law, Supervisors: Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. and Fadli Rahmadanil S.H., M.H., 78 Page, 2026)

Electoral districts are an important part of the election system that greatly influence election results, as they serve as the battleground for candidates to compete for voters' support. In the 2024 elections, the composition of electoral districts used will still be the same as in the 2019 elections, as listed in Annexes III and IV of Law No. 7 of 2017 concerning elections. The Constitutional Court Decision No. 80/PUU-XX/2022 mandated that the authority over electoral districts be returned to the KPU and requested that the composition of the districts be recalculated and reorganized. The problem formulation discussed in this study is: First, how are the principles of electoral district formation being met in the 2024 Legislative elections for the House of Representatives? Second, what is the concept of electoral district (dapil) arrangement for the future to achieve honest and fair elections in Indonesia? This study aims to find out how the principles of electoral district arrangement are fulfilled in the districts listed in Law Number 7 of 2017 and in PKPU Number 6 of 2023, as well as to understand the concept and rules for forming ideal electoral districts to ensure honest and fair elections in Indonesia. The research method used is normative legal research, supported by interviews and secondary data from BPS, as well as election result recaps by KPU, and elaborated using legislative, case study, and comparative approaches. The research results and discussion show that in the 2024 elections, various problems related to electoral districts are still found. The Constitutional Court Decision No. 80/PUU-XX/2022 has returned the authority over electoral districts to the KPU, but in practice, the KPU only copied the electoral districts from the Appendix of Law No. 7 of 2017, which caused many problems in the 2024 elections. For the future, more detailed regulations regarding the drafting of electoral districts and seat allocation are needed to achieve elections that are honest, fair, and with integrity in Indonesia.

Keywords: *Seat Allocation; Electoral District; Legislative Election; Principles of Forming Electoral Districts.*

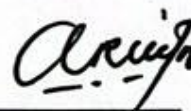
This minor thesis has defended in front of the examiner team at, August, 5th 2026.

Examiner,

Signature 	Examiner I 	Examiner II 
Rahmat Habib	Dr. Muhammad Irham, S.H., M.H.	Ilhamdi Putra, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Departemen of Constitutional Law: **Arfiani, S.H., M.H.**


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: